

**PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN)
DI KELURAHAN TELUK MERBAU
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Syarat Dalam Penulisan Skripsi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I)
Di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

MISRA YETTI
NIM. 10625003896

PROGRAM S1

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Penelitian berjudul **“PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN TELUK MERBAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang dilaksanakan di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Dari hasil observasi dan wawancara di lapangan, dimana ± 117 orang dengan persentase 9% (persen) masyarakat yang dikategorikan kurang mampu tidak mendapatkan bantuan beras miskin (RASKIN) dari pemerintah. Sementara bantuan beras miskin (RASKIN) merupakan salah satu program pemerintah dengan tujuan menolong perekonomian masyarakat yang kurang mampu, di antaranya masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana sistem pelaksanaan pendistribusian beras miskin (RASKIN) di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir; Bagaimana Kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan beras miskin (RASKIN) di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir; Bagaimana analisis ekonomi Islam tentang pendistribusian beras miskin (RASKIN) di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Dari tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui sistem pendistribusian beras miskin (RASKIN) Di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir; Untuk mengetahui standar masyarakat berhak mendapatkan bantuan beras miskin (RASKIN) Di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir; dan Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang sistem pendistribusian beras miskin (RASKIN) Di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Subjek dalam penelitian ini adalah Lurah, Karyawan, dan Masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Sementara objek dalam penelitian ini adalah pendistribusian beras miskin (RASKIN) Di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 1.288; dari masyarakat yang kurang mampu yang mendapatkan dan tidak mendapatkan Raskin. Dalam menetapkan sampel penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*; Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 orang, terdiri dari Lurah, 4 orang pegawai Kelurahan dan 35 orang masyarakat Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, angket, dan wawancara. Sementara teknik analisa data adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan jalan mengklasifikasikan data-data yang akan dikumpulkan di lapangan berdasarkan persamaan jenis. Kemudian data tersebut dianalisis dan diuraikan secara gamblang sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, sehingga diperoleh hasil penelitian, bahwa Pendistribusian Raskin kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dilihat dari dua aspek, yaitu pelaksanaan pendistribusian dan standar masyarakat kurang mampu yang mendapatkan bantuan Raskin.

Adapun dalam sisi pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada masyarakat miskin di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, terlihat dari sisi pendistribusian tidak merata, besarnya bantuan yang diberikan dan pendistribusian yang tidak gratis. Sementara dari sisi standar masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan Raskin di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dimana dari sisi konsep dan tujuan sesuai dengan konsep ekonomi Islam, yaitu masyarakat kurang mampu yang dilihat dari besarnya penghasilan, jumlah tanggung dan status dalam keluarga. Akan tetapi, dari segi pelaksanaannya ditemukan adanya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
ABSTRAK	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	11
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELURAHAN TELUK MERBAU KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR	
A. Kondisi Geografis dan Demografis	13
B. Pendidikan.....	17
C. Kondisi Keagamaan	20
D. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	22
E. Kondisi Adat Istiadat dan Sosial Budaya.....	24
 BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Distribusi.....	29
B. Kriteria Masyarakat Mendapatkan Bantuan Raskin	33
C. Urgensi dan Tujuan Distribusi	34
D. Pendistribusian Pendapatan.....	39
E. Model Ekonomi Politik.....	49
 BAB IV PEMBAHASAN	
A. Sistem Pelaksanaan Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN)	51
B. Standar Masyarakat Yang Berhak Mendapatkan Bantuan Beras Miskin (RASKIN)	59
C. Analisis Ekonomi Islam	67
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran	76
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	: Penduduk Berdasarkan Tingkat Kemiskinan.....	5
Tabel II.1	: Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	15
Tabel II.2	: Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa.....	16
Tabel II.3	: Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Tabel II.4	: Sarana dan Prasarana Pendidikan	19
Tabel II.5	: Sarana dan Prasarana Ibadah	21
Tabel II.6	: Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	23
Tabel IV.1	: Pendistribusian Secara Langsung	52
Tabel IV.2	: Besarnya Bantuan Raskin	53
Tabel IV.3	: Pendistribusian Secara Gratis	54
Tabel IV.4	: Pendistribusian Raskin Sangat Membantu Masyarakat...	55
Tabel IV.5	: Pendistribusian Berdasarkan Data dari RT	56
Tabel IV.6	: Pendistribusian Sesuai Kriteria	57
Tabel IV.7	: Setiap Masyarakat Kurang Mampu Mendapatkan Bantuan Raskin	59
Tabel IV.8	: Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan Raskin	60
Tabel IV.9	: Kriteria Masyarakat Kurang Mampu adalah Penghasilan Perbulan	62
Tabel IV.10	: Kriteria Masyarakat Kurang Mampu adalah Jumlah Tanggungan.....	63
Tabel IV.11	: Kriteria Masyarakat Kurang Mampu adalah Status Perkawinan.....	64
Tabel IV.12	: Identitas Diri (KK dan KTP).....	65
Tabel IV.13	: Petugas Penyerahan Raskin	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kelurahan Teluk Merbau merupakan salah satu daerah yang terletak di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Kelurahan ini merupakan salah satu daerah yang memiliki dataran rendah, bertanah liat dan keras-memiliki dua musim dalam setahun, yaitu musim kemarau dan penghujan. Adapun luas wilayahnya $\pm 1.790 \text{ hektare}^2$ dan sebagian besar kawasannya telah dibangun perumahan rakyat dan hutan bakau (*hutan mangrove*) yang memiliki potensi dijadikan sebagai kawasan perkebunan, seperti sawit¹.

Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir memiliki heterogen suku bangsa, seperti suku Melayu, Batak dan Jawa. Akan tetapi, mayoritas suku bangsa di Kelurahan ini adalah Melayu, dan selanjutnya suku Jawa. Suku Melayu merupakan salah satu suku bangsa yang identik dengan Islam. Oleh karena itu, Islam merupakan agama atau keyakinan yang mayoritas di Kelurahan ini².

Dalam bidang tradisi dan kebudayaan, terlihat jelas bahwa masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir masih mempercayai tradisi dan budaya nenek moyang. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan perilaku masyarakat yang masih percaya dengan benda-benda yang dianggap sakti atau keramat yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat seperti keris, batu cincin, azimat dan lain sebagainya³.

¹ Sumber : Data Geografis dan Demografi Kepenghuluan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010

² *Ibid.*

³ Syarifuddin (Tokoh Masyarakat Kepenghuluan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir), *wawancara*, tanggal 09 Nopember 2010.

Adapun bila dilihat dalam bidang perekonomian, dapat dilihat bahwa masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir bekerja sebagai nelayan, buruh, tani, dan tidak sedikit di antaranya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi pemerintahan. Namun, dari sekian banyaknya jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat, ternyata mayoritas mereka bekerja sebagai nelayan. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang berada di pinggir pantai atau pesisir dan sebagai kawasan yang banyak menghasilkan ikan⁴.

Berdasarkan data demografis penduduk di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, sehingga dapat diketahui bahwa Kelurahan ini merupakan kawasan yang banyak ditemukan angka kemiskinan. Dari data yang diperoleh $\pm 47\%$ (persen) penduduk di Kelurahan ini masih berada di bawah garis kemiskinan. Kondisi besarnya, angka kemiskinan tersebut, menjadikan masyarakat mendukung dan antusias dengan program yang dijalankan pemerintah yaitu memberikan bantuan beras miskin (RASKIN) kepada masyarakat kurang mampu, sehingga mereka terbantu dan dapat menjalani kehidupannya sebagaimana masyarakat lainnya.

Kebijakan pemerintahan daerah dalam memberikan bantuan Raskin (Beras Miskin) kepada masyarakat tidak mampu melalui dukungan dan rekomendasi aparat setempat, serta didukung oleh database yang ada mulai dari tingkat Kelurahan/Kepenghulan, sampai RT. Aparat setempat merupakan perpanjangan tangan (*estapet*) dari pemerintah guna mendistribusikan bantuan Raskin (Beras Miskin) kepada masyarakat tidak mampu, seperti aparat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

⁴ Sumber : Data Geografis dan Demografis Kepenghulan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2009.

Secara sederhana distribusi dapat dimaknai sebagai “penyaluran”. Menurut Dessy Anwar dalam kamusnya; distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat⁵. Adapun distribusi menurut konsep Kapitalisme adalah mencakup pengaturan tentang kepemilikan pribadi⁶.

Defenisi demikian yang mendasari tujuan distribusi dalam konsep Kapitalisme, yaitu pengaturan tentang kepemilikan individu (*private*)⁷. Oleh karena itu, di dalam konsep ekonomi kapitalisme dibenarkan melakukan praktek monopoli (*ikhtikar*), dengan tujuan semata-mata memberikan kebebasan kepada individu untuk menguasai dan memiliki sesuatu (materi).

Konsep distribusi dalam ekonomi kapitalisme berbeda dengan konsep distribusi di dalam Islam. Di dalam Islam sangat melarang terjadinya praktek monopoli (*ikhtikar*), yang berakibat kepada tidak meratanya pendistribusian atas barang atau hasil produksi kepada masyarakat. Bila hal ini terjadi, maka urusan hajat hidup orang banyak akan terganggu, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya⁸. Oleh karena itu, distribusi dalam ekonomi Islam mencakup tentang pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan⁹.

⁵ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), cet. Ke-1, hal. 125.

⁶ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Khattab*, diterjemah oleh Asmuni Sholeh Zamakhsari, (Jakarta: Khalifa (Pustaka al-Kautsar Group), 2003), cet. Ke-1, hal. 212.

⁷ *Ibid.*

⁸ <http://www.google.com-tatikmaryati-artikel/21/12/2010//>

⁹ *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep ekonomi Islam juga membahas permasalahan tentang distribusi. Karena distribusi merupakan bagian dari praktek perekonomian yang terjadi di masyarakat. Karena di dalam konsep ekonomi membahas tentang produksi, konsumsi, distribusi baik barang maupun jasa yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, program pemerintah dalam hal pendistribusian bantuan raskin kepada masyarakat kurang mampu seperti di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, merupakan program dalam bidang perekonomian.

Hasil wawancara penulis dengan pegawai Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dapat dipahami bahwa tujuan dilaksanakan program tersebut dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan di kalangan masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan masyarakat yang dikategorikan dan semestinya berhak dan mendapatkan bantuan tersebut, namun hak-hak mereka berpindah tangan kepada orang-orang yang tidak seharusnya memiliki hak dan mendapatkan bantuan tersebut.

Hasil wawancara dengan Halimah; bahwa ia mengaku dan menyadari keluarganya termasuk kategori kurang mampu. Hal ini didukung juga dengan statusnya sebagai janda dengan penghasilan kurang dari Rp. 1.000.000,- per sebulan. Sementara, ia memiliki 5 orang anak (tanggungan) yang masih sekolah. Namun, ia tidak mendapatkan bantuan raskin (beras miskin) tersebut. Akan tetapi, adanya di antara masyarakat yang tidak termasuk kategori miskin dengan penghasilan lebih dari Rp. 1.000.000,- per sebulan, mendapatkan bantuan tersebut¹⁰.

¹⁰ Halimah (Masyarakat: Kepenghuluan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir), wawancara, 08 Nopember 2010.

Di samping itu, hasil wawancara dengan pegawai Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, program pendistribusian beras miskin (RASKIN) sudah sampai kepada tujuan dan target yang diinginkan¹¹. Sementara hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat, ternyata dalam satu RT ada ± 9 orang¹² masyarakat yang dikategorikan miskin tidak mendapatkan bantuan beras miskin tersebut. Oleh karena itu, bila dipersentasekan terdapat ± 117 orang masyarakat dikategorikan miskin dari 13 RT di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir tidak mendapatkan bantuan raskin (beras miskin). Jadi, dari rata-rata persentase tersebut, maka $\pm 9\%$ (persen) jumlah masyarakat tidak mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang tidak mendapatkan bantuan beras miskin (RASKIN). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL I.1
PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT KEMISKINAN

NO	Demografis	JUMLAH	Persentase
1	Penduduk Yang Kurang Mampu	1.288	47%
2	Penduduk Yang Mampu	1.453	53%
3	Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Bantuan RASKIN	117	9%
4	Penduduk Yang Mendapatkan Bantuan RASKIN	1.171	91%
5	Jumlah Penduduk Keseluruhan	2.741	100%

Sumber Data: Data Olahan Observasi dan Wawancara, 2011.

¹¹ R. Arfan (Pegawai: Kepenghuluan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir), *wawancara*, 09 Nopember 2010

¹² Baharum (Masyarakat: Kepenghuluan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir), *wawancara*, 09 Nopember 2010.

Dari data olahan observasi dan wawancara pada tabel di atas, dapat dipahami bahwa bertolak belakang antara hasil wawancara dengan R. Arfan dengan data olahan observasi dan wawancara pada tabel di atas. Perbedaan tersebut antara ungkapan yang disampaikan oleh R. Arfan, bahwa program pendistribusian beras miskin (RASKIN) sudah mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Dalam hal ini dapat dipahami pendistribusian bantuan beras miskin (RASKIN) diterima oleh seluruh masyarakat yang dikategori kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Sementara dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan Baharum, maka diperoleh ± 117 orang dengan persentase 9% (persen) dari 1.288 orang masyarakat yang dikategorikan kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan beras miskin dari pemerintah. Oleh karena itu, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul **"PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN TELUK MERBAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM"**.

B. BATASAN MASALAH

Agar penelitian terarah dan fokus kepada permasalahan yang diteliti, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang "Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Teluk Merbau Menurut Perspektif Ekonomi Islam".

C. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pendistribusian beras miskin (RASKIN) di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana Kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan beras miskin (RASKIN) di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana analisis ekonomi Islam tentang pendistribusian beras miskin (RASKIN) di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem pendistribusian beras miskin (RASKIN) Di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
2. Untuk mengetahui standar masyarakat berhak mendapatkan bantuan beras miskin (RASKIN) Di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang sistem pendistribusian beras miskin (RASKIN) Di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun kegunaan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kontribusi dalam dunia pendidikan terutama tempat penulis menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.
2. Sebagai referensi bagi penulis berikutnya khususnya yang akan meneliti tentang pendistribusian.
3. Sebagai tugas dan salah syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau.

E. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*); yang dilaksanakan di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan penulis memilih Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sebagai lokasi dalam penelitian ini karena penulis mengamati secara langsung, banyaknya masyarakat yang dapat dikategorikan memiliki tingkat ekonomi kurang mampu (miskin), tidak mendapatkan bantuan beras miskin (RASKIN) tersebut. Sementara mereka termasuk kategori masyarakat yang memiliki hak.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Lurah, Karyawan, dan Masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Sementara objek dalam penelitian ini adalah pendistribusian beras miskin (RASKIN) Di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah orang miskin yang mendapatkan dan tidak mendapatkan Raskin di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir berjumlah 1.288 orang. Dalam menetapkan sampel penelitian, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan menetapkan sendiri jumlah sampel dari populasi yang ada. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 orang, terdiri dari Lurah, 4 orang pegawai Kelurahan dan 35 orang masyarakat Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, adalah data yang dikumpulkan penulis secara langsung dari lapangan, atau data yang diperoleh dari hasil angket dan wawancara dengan responden di lapangan dan untuk maksud tersebut penulis menggunakan angket penelitian, yaitu Lurah, Karyawan, dan masyarakat kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Data Sekunder, adalah meliputi segala informasi yang diperlukan untuk menyusun data-data berdasarkan penelitian baik berupa konsep, definisi, ataupun teori-teori yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan permasalahan yang akan dilaksanakan melalui penelitian ini. Adapun data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi

terkait, seperti Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian, yaitu tentang pendistribusian beras miskin (RASKIN) Di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Wawancara, yaitu menanyakan langsung kepada responden yang sifatnya mengarahkan dan mengingatkan masyarakat atau responden tentang objek kajian penelitian, yaitu melakukan tanya jawab kepada Lurah, Karyawan dan Masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
- c. Angket, yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, kemudian diajukan kepada responden guna mempermudah *interview*, seperti memberikan pertanyaan kepada masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpul dianalisa dengan menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu dengan jalan mengklasifikasikan data-data yang akan dikumpulkan di lapangan berdasarkan persamaan jenis. Kemudian data tersebut dianalisis dan diuraikan secara gamblang sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini menggunakan tiga metode penulisan:

- a. Metode Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu dengan mengumpulkan pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Diskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dan mengemukakan permasalahan secara objektif lalu dianalisa secara kritis, sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian terdiri dari 5 bab penelitian, adalah sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab ini membahas tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KELURAHAN TELUK MERBAU KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR; dalam bab ini membahas tentang Letak Geografis dan Demografis, Pendidikan dan Agama, Keadaan Ekonomi, dan Keadaan Sosial dan Budaya

BAB III : PENDISTRIBUSIAN DALAM ISLAM; dalam bab ini membahas tentang Pengertian, Dasar Hukum, Tujuan Dalam Distribusi, dan Kepemilikan Dalam Distribusi.

BAB IV : PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN DI KELURAHAN TELUK MERBAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM; dalam bab ini membahas tentang Sistem pendistribusian beras miskin (Raskin) di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, Standar Masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan beras miskin (Raskin) di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dan Tinjauan ekonomi Islam tentang pendistribusian beras miskin (Raskin) di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELURAHAN TELUK MERBAU KECAMATAN KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR

A. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Kelurahan Teluk Merbau merupakan salah satu daerah integral yang terletak di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang berdaratan rendah, bertanah liat dan keras dengan curah hujan yang tinggi per tahun rata-rata adalah $\pm 2000 - 3000$ mm pertahun¹.

Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir mempunyai luas wilayah ± 1.790 hektar yang terdiri dari 4 RW (Rukun Warga) dan 13 RT (Rukun Tetangga). Sebagian wilayahnya digunakan untuk perkebunan sawit, hutan bakau (hutan *mangrove*), dan wilayah pertanian. Ketinggian tanah dari permukaan laut diperkirakan $\pm 5 - 6$ meter, suhu rata-rata adalah $30^{\circ}\text{C} - 32^{\circ}\text{C}$; bahkan pada hari-hari tertentu dapat mencapai 35°C , sebagaimana daerah-daerah beriklim tropis lainnya. Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir terdapat dua musim dalam sepanjang tahunnya yaitu hujan dan kemarau.

Sementara jarak antara lokasi Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan pusat Kantor Kecamatan $\pm 1,5$ km, dan ± 123 km jarak antara lokasi Kelurahan dengan pusat Kabupaten Rokan Hilir, serta ± 279 km.

¹ Demografis dan Monografis Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, 2010.

Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah wilayah yang dikelilingi lelautan dan sungai, sehingga mempengaruhi kondisi tanah. Adapun sungai yang mengelilingi kelurahan ini adalah sungai Kubu. Transportasi yang digunakan adalah transportasi darat dan laut. Untuk transportasi dalam kota menggunakan transportasi darat, seperti mobil, honda, becak, sepeda, sedangkan transportasi laut yang digunakan seperti perry, pompong, dan sampan².

Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- ✓ Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Kubu
- ✓ Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Kubu
- ✓ Sebelah barat berbatasan dengan Rantau Panjang Kanan/Teluk Piyai, dan
- ✓ Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Kubu³.

Pendudukan merupakan salah satu modal dasar pembangunan suatu bangsa sehingga pengetahuan tentang masalah kependudukan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, prioritas pembangunan harus diletakan pada pembinaan kualitas dan kepribadian Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan peningkatan kecerdasan, keterampilan serta kesehatan fisik dan mental anak-anak yang menjadi generasi penerus agama dan bangsa, tanpa penduduk yang berkualitas, maka bangsa yang mempunyai modal yang kuat tidak akan dapat menyongsong pembangunan gemilang, namun sebaliknya.

² Data Kantor Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010.

³ Data Kantor Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010.

Data statistik Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir tahun 2010 berjumlah 2.741 jiwa, dengan perincian 1.261 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1.210 jiwa berjenis kelamin perempuan yang terhimpun dalam 618 Kepala Keluarga (KK)⁴. Untuk lebih jelas dapat diperhatikan tabel sebagai berikut:

Tabel II.2
Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah/Jiwa	Persentase
1.	Laki-laki	1.261	51%
2.	Perempuan	1.210	49%
Jumlah		2.741	100%

Sumber: Data Kelurahan Teluk Merbau Tahun 2010.

Dari tabel II. 2 penduduk berdasarkan jenis kelamin, sehingga dapat diketahui bahwa penduduk di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.261 jiwa dengan persentase 51% (persen), sementara penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 1.210 jiwa dengan persentase 49% (persen). Dari jumlah/persentase jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di atas, maka dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah penduduk berjenis kelamin laki-laki, adalah 1.261 (51%).

⁴ Data Kantor Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010.

Penduduk di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir merupakan penduduk yang multi etnis; akan tetapi, mereka dapat hidup rukun dan bekerja sama dengan baik, terutama dalam urusan sosial kemasyarakatan, seperti bergotong royong. Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan multi etnis di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 2
Penduduk Berdasarkan Suku Bangsa

No	Suku Bangsa	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	Melayu	1,395	56%
2	Jawa	681	28%
3	Batak	395	16%
Jumlah		2,471	100%

Sumber: Data Kelurahan Teluk Merbau Tahun 2010.

Berdasarkan tabel II. 2 penduduk berdasarkan suku bangsa, sehingga diketahui bahwa terdapat tiga suku bangsa di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, yaitu Melayu berjumlah 1.395 jiwa dengan persentase 56% (persen), Jawa berjumlah 681 jiwa dengan persentase 28%, dan Batak berjumlah 395 jiwa dengan persentase 16% (persen). Dari jumlah penduduk dan persentase di atas, maka dapat dipahami bahwa mayoritas suku bangsa di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah suku Melayu yaitu 1.395 jiwa (56%).

B. PENDIDIKAN

Pendidikan adalah pilar utama dalam pembentukan mental atau karakter seorang siswa. Pendidikan yang baik akan membentuk mental atau karakter siswa yang lurus dan terarah. Pembinaan mental yang baik pada akhirnya akan bermuara pada kebaikan di kehidupan yang akan datang. Kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan persoalan-persoalan yang rumit. Dengan berbekal pendidikan yang baik, maka siswa akan mempunyai mental atau karakter yang kuat, dan mempunyai pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas bisa diperoleh dari bangku sekolah⁵.

Di samping itu, pendidikan pada hakekatnya berlangsung dalam suatu proses. Dan proses itu berupa transformasi nilai-nilai pengetahuan, teknologi dan keterampilan. Penerima proses adalah anak atau siswa yang sedang tumbuh dan berkembang menuju ke arah pendewasaan kepribadian dan penguasaan pengetahuan⁶.

Selain itu, pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang diperoleh melalui proses yang panjang dan berlangsung sepanjang kehidupan. Pendidikan merupakan identitas suatu bangsa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan suatu hal yang membutuhkan perhatian. Untuk mengetahui penduduk di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan pendidikan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

⁵ Rumini, S, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta: UPP IKIP Yogyakarta, 1995), Cet. Ke-4, h. 21.

⁶ *Ibid*, h. 22.

Tabel II. 3
Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah/Jiwa	Persentase
1	Tingkat Sekolah Dasar (SD)	301	12%
2	Tingkat Menengah (SMP)	780	32%
3	Tingkat Atas (SLTA)	983	40%
4	Diploma/ Perguruan Tinggi	157	6%
5	Tidak / sekolah	250	10%
Jumlah		2,471	100%

Sumber: Data Kelurahan Teluk Merbau Tahun 2010.

Pada tabel II. 3 penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di atas, maka dapat diketahui bahwa penduduk yang masih SD berjumlah 301 jiwa dengan persentase 12% (persen), SMP berjumlah 780 jiwa dengan persentase 32% (persen), SLTA berjumlah 983 jiwa dengan persentase 40% (persen), Diploma/Perguruan Tinggi 157 jiwa dengan persentase 6%, dan penduduk yang putus/belum sekolah berjumlah 250 jiwa dengan persentase 10% (persen). Berdasarkan tabel II. 3 tentang penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di atas, sehingga dapat dipahami bahwa mayoritas penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah penduduk berpendidikan tingkat atas/ SLTA sederajat (40%).

Di sisi lain, tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu tempat sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana dan sistem yang digunakan dalam pendidikan itu sendiri. Karena dengan tersedianya sarana prasarana dan

ditopang oleh sistem pendidikan yang baik, hal ini akan mampu mewujudkan cita-cita dan tujuan dari pendidikan nasional, yaitu mewujudkan peserta didik yang menguasai sains teknologi (IPTEK) dan senantiasa berdasarkan kepada keimanan dan ketakwaan (IMTAQ). Dengan demikian, untuk mengetahui sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II. 4
Sarana Dan Prasana Pendidikan

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Unit
1	Tingkat Taman Kanak-Kanak	3
2	Tingkat Dasar sederajat	5
3	Tingkat Menengah sederajat	2
4	Tingkat Atas/Kejuruan sederajat	2
5	Akademi	1
Jumlah		13

Sumber: Data Kelurahan Teluk Merbau Tahun 2010.

Dari tabel II. 4 sarana dan prasarana pendidikan di atas, sehingga dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, yaitu tingkat TK (Taman Kanak-Kanak) berjumlah 3 unit, tingkat SD (Sekolah Dasar) sederajat berjumlah 5 unit, tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) sederajat berjumlah 2 unit, tingkat SLTA (Sekolah Menengah Atas) sederajat berjumlah 2 unit, dan Akademi berjumlah 1 unit; dengan jumlah keseluruhan adalah 13 unit.

Berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, maka sarana dan prasarana ini sudah dapat memenuhi kebutuhan penduduk dalam menikmati pendidikan. Akan tetapi, fakta sarana pendidikan yang ada belum mampu secara optimal menciptakan sumber daya insani (SDI) yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan. Kondisi demikian, disebabkan belum mendukungnya sistem pendidikan yang digunakan. Karena, menurut pengamat pendidikan⁷; bahwa sistem pendidikan yang digunakan di NKRI adalah sistem pendidikan materialisme dan sekularisme⁸. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana saja, tidak cukup untuk menciptakan membentuk lahirnya peserta didik (lulusan-lulusan lembaga pendidikan tersebut) yang mampu bersaing dan menghadapi perkembangan zaman serta memiliki kepribadian yang khas yaitu kepribadian Islam (*syakhsiyyah Islamiyyah*).

C. KONDISI KEAGAMAAN

Dalam membangun masyarakat, agama adalah salah satu faktor terpenting dari institusi sosial. Ketika faktor ini diabaikan, maka dapat dipastikan sulitnya dalam menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Karena pada fitrah manusia adalah makhluk beragama

⁷ <http://www.okezone.com/21-05-2011//>

⁸ Materialisme dalam pendidikan adalah sistem pendidikan dilaksanakan dengan tujuan mengejar keuntungan materi/bisnis (*profit oriented*). Sementara sistem pendidikan sekularisme adalah sistem pendidikan yang tidak memadukan dan menjadikan aqidah Islam sebagai dasar dalam pendidikan itu sendiri. Sistem pendidikan sekularisme diambil dari kata sekular. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani; sekularisme adalah sebuah paham yang memisahkan antara agama dengan kehidupan; antara agama dengan negara. Lihat Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Peraturan Hidup Dalam Islam* (terj), Abu Amin, (Bogor: Thariqul Izzah, 2001), h. 58

(*gharizatul tadayyun*)⁹. Ketika hal-hal yang mengarahkan kepada naluri agama ini ditutup peluangnya di tengah masyarakat, hal ini merupakan salah satu indikasi dari paham sekulerisme-yaitu memisahkan antara agama dengan kehidupan atau memisahkan agama dengan negara-yang lahir dari ideologi Kapitalisme¹⁰

Di samping itu, dilihat dari data statistik Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat diketahui bahwa mayoritas penduduknya beragama Islam (100%), dan tidak ditemukan adanya penduduk yang meyakini selain Islam. Hal ini terlihat dari tabel di bawah ini:

Tabel II. 5
Sarana dan Prasarana Ibadah

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah/Unit
1	Masjid	2
2	Mushalla	5
3	Gereja	-
4	Vihara	-
5	Wihara	-
Jumlah		7

Sumber: Data Kelurahan Teluk Merbau Tahun 2010.

Pada tabel II. 5 tentang sarana dan prasarana pendidikan di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, sehingga dapat dipahami bahwa tidak adanya sarana ibadah selain Islam. Dari tabel II. 5 di atas, dimana hanya ditemukan sarana dan pra sarana ibadah berupa Masjid berjumlah 2 unit dan Mushalla 5 unit.

⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Syakhisiyah Islamiyyah*, ahli bahasa Zakia, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), Cet. Ke-3, h. 14.

¹⁰ Sekulerisme adalah paham yang memisahkan agama dengan kehidupan dan memisahkan agama dengan negara. Lihat Taqiyuddin An-Nabhany, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, Ahli Bahasa Abu Amin,dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), Cet. Ke-3, h. 39 menurut Sayyid Qutb, sekulerisme adalah mendirikan kehidupan tidak berasaskan pada agama.

D. KONDISI EKONOMI MASYARAKAT

Ekonomi merupakan suatu pembahasan penting dan menarik. Karena, pembahasan ekonomi merupakan pembahasan menuntut untuk membahas tentang tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Di sisi, faktor yang melatarbelakangi manusia bekerja disebabkan oleh dorongan materi dalam rangka meraih tujuan materi (*qimatu al-madiyyah*). Bekerja merupakan proses dalam memperoleh sesuatu yang merupakan sebagai faktor penyebab bagi seseorang dalam menjaga keberlangsungan hidup.

Menurut Ismail Yusanto dalam bukunya pengantar ekonomi Islam, salah satu motivasi yang kuat dari setiap giat dalam bekerja adalah dalam rangka memperoleh hasil berupa gaji yang layak guna menjaga keberlangsungan hidup.¹¹ Oleh karena itu, gaji yang diterima seseorang dipengaruhi oleh mutu dan kualitas serta tanggung jawab dari pekerjaan yang ditekuninya. Hal ini semata-mata dilakukan untuk meraih kesejahteraan hidup, baik pribadi maupun dalam rumah tangga.

Kesejahteraan adalah asal kata dari sejahtera. Dessy Anwar menjelaskan bahwa sejahtera adalah amen sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya). Sementara kesejahteraan menurutnya adalah hal atau keadaan sejahtera; keamanan; keselamatan; ketentraman; kesenangan hidup dan sebagainya; kemakmuran¹².

¹¹ Ismail Yusanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Izzah, 2009. Cet. Ke-1, hal.

¹² Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Karya Abditarna, 2001), cet. Ke- 1, hat. 412.

Dengan demikian, untuk mengetahui tingkat ekonomi penduduk di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan yang dimiliki masyarakat. Hal ini dapat diukur dari jenis pekerjaan yang dimiliki. Karena, jenis pekerjaan akan mempengaruhi jumlah materi yang diperoleh dan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Untuk melihat tingkat ekonomi dari jenis pekerjaan penduduk di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 6
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Penduduk/ Jiwa	Persentase
1	PNS	58	9%
2	ABRI	4	1%
3	Pegawai Swasta	130	19%
4	Pedagang	0	-
5	Tani	234	35%
6	Tukang	11	2%
7	Nelayan	7	1%
8	Jasa	50	7%
9	Perkebunan	15	2%
10	Pensiunan	150	22%
11	Lain-Lain	15	2%
	Jumlah	674	100

Sumber: Data Kelurahan Teluk Merbau Tahun 2010.

Berdasarkan tabel II. 6 tentang penduduk berdasarkan jenis pekerjaan, maka dapat diketahui bahwa terdapat 11 jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, yaitu PNS berjumlah 58 jiwa dengan persentase 9% (persen), ABRI berjumlah 4 jiwa dengan persentase 1% (persen), Pegawai swasta berjumlah 130 jiwa dengan persentase 19% (persen), pedagang tidak ada (0%), tani berjumlah 234 berjumlah 35% (persen), tukang berjumlah 11 jiwa dengan persentase 2% (persen), nelayan berjumlah 7 jiwa dengan persentase 1% (persen), jasa berjumlah 50 jiwa dengan persentase 7% (persen), pekebunan 15 orang dengan persentase 2% (persen), pensiunan berjumlah 150 jiwa dengan persentase 22% (persen), dan lain-lain (pekerja tidak tetap/ belum bekerja) berjumlah 15 jiwa dengan persentase 2% (persen).

Dari tabel di atas, maka dapat dipahami bahwa mayoritas penduduk di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir bekerja sebagai tani adalah berjumlah 234 jiwa (35%), sementara minoritas penduduk bekerja sebagai ABRI adalah 4 (1%), dan tidak ada di antara penduduk yang bekerja sebagai pedagang.

E. KONDISI ADAT ISTIADAT DAN SOSIAL BUDAYA

Dari aspek sosial dan budaya, penduduk Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah penduduk yang mengambil garis keturunan dari pihak bapak, dan dikenal dengan istilah *patrilineall*. Karena, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dari aspek demografis mayoritas penduduk di daerah ini bersuku bangsa melayu dan beragama Islam.

Oleh karena itu, secara otomatis sebagian besar adat dan tradisi yang berkembang sangat dipengaruhi oleh Islam. Hal ini dapat dilihat pada acara penyambutan kelahiran, menikah dan ketika ada di antara warga yang meninggal dunia. Dari ketiga bentuk agenda tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya dan tradisi di dalam Islam.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan waktu, serta didukung dengan kemajuan dalam bidang *sains teknologi*, sehingga di tengah masyarakat, terjadi pergeseran nilai-nilai adat dan budaya yang ada dan atau telah diwariskan oleh generasi sebelumnya. Hal ini terlihat jelas dari sikap dan perilaku masyarakat yang lebih mengutamakan rasionalitas dari pada adat yang lebih menuntut kepada keyakinan semata. Sikap dan perilaku demikian, sebagian besar ditemukan pada remaja atau generasi mudanya.

Kondisi demikian merupakan kontradiktif terhadap sikap dan perilaku dari generasi muda atau remajanya pada dua dasawarsa yang lalu, dimana dalam berinteraksi atau bergaul dengan lawan jenis merupakan suatu hal yang tabu atau sulit ditemukan, karena generasi muda atau remajanya masih dan sangat menghargai nilai-nilai adat dan agama yang ada. Akan tetapi, perilaku dan sikap tersebut sangat sukar ditemukan pada kondisi sekarang ini, seperti interaksi antar lawan jenis yang sampai kepada melanggar nilai-nilai dan norma agama dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Karena, menurut sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa agama dan tradisi yang ada dan merupakan warisan dari generasi sebelumnya tidak sesuai (relevan) dengan perkembangan situasi, waktu dan zaman.

Oleh karena itu, di tengah masyarakat dapat diklasifikasikan bahwa ada dua kelompok masyarakat dalam menyikapi adat dan tradisi yang ada selama ini di tengah masyarakat, yaitu:

1. Kelompok yang masih mendukung dan mengharapkan serta berusaha menjaga kelestarian adat istiadat yang telah diwariskan;
 2. Kelompok yang beranggapan bahwa adat tidak perlu dipertahankan.
- Karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang serba canggih sekarang.

Di samping itu, dari sisi sosial dan budaya di tengah masyarakat Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dimana terdapat beberapa bentuk budaya yang masih pertahankan. Hal ini terlihat dari aktifitas penduduk dalam bidang kemasyarakatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel berikut ini:

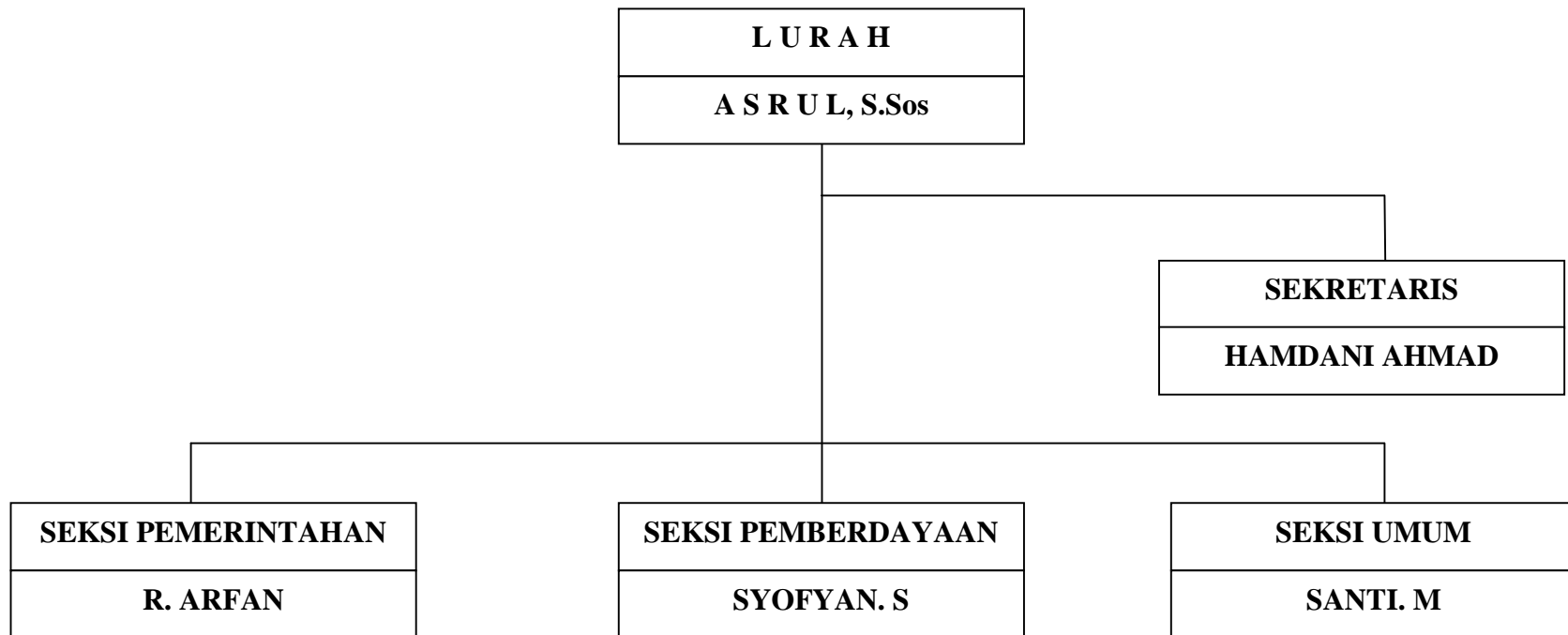
Tabel II. 7
Budaya dan Kemasyarakatan

No	Jenis Budaya/ Kemasyarakatan	Jumlah
1	Majlis Taklim	5 Kelompok
2	Wirid Yasin	12 Kelompok
3	Remaja	2 Kelompok
4	Majlis Zikir	9 orang
5	Barzanji dan Marhaban (Qasyidah)	8 orang
6	Zapin	40 orang (4 Klp)
7	Pencak Silat	92 orang
8	Rebana	6 Kelompok

Sumber: Data Kelurahan Teluk Merbau Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis budaya/ kemasyarakatan di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, adalah 5 Majelis taklim, 12 Perkumpulan wirid yasin, 2 kelompok/ikatan remaja Masjid Mushalla, 9 orang yang menguasai zikir Burdah, 8 orang yang menguasai Barzanji dan Marhaban (Qasidah), 4 kelompok Zapin terdiri dari 40 orang, 92 orang yang menguasai pencak silat, dan 6 kelompok rebana (musik Islami).

**STRUKTUR KEPEMIMPINAN
KELURAHAN TELUK MERBAU KECAMATAN KUBU
KABUPATEN ROKAN HILIR**



Sumber Data: Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu, Tahun 2011

BAB III

TINJAUAN TEORETIS

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM DISTRIBUSI

Distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat¹. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa distribusi merupakan salah satu kegiatan dalam ekonomi dan perlu mendapat perhatian serius. Namun, pemahaman demikian berbeda bila dilihat menurut ekonomi Kapitalisme, bahwa faktor distribusi bukanlah suatu faktor yang mengakibatkan timbulnya masalah ekonomi di masyarakat, melainkan faktor produksi, sebagaimana yang diungkapkan: “inti permasalahan ekonomi terletak pada produksi. Dengan demikian, para ekonom kapitalis berpendapat bahwa penyebab kemiskinan (ketidacukupan) adalah kurangnya atau langkanya atau terbatasnya (*limited*) barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas (*unlimited*) dan beraneka ragam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, manusia perlu bekerja keras memproduksi sebanyak-banyaknya alat pemuas kebutuhannya itu. Untuk menghilangkan *gap* ini, harus dengan cara meningkatkan produksi sampai titik maksimum”².

¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h. 125.

² Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (terj) oleh M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), Cet. Ke-1, h. 286.

Dari pendapat di atas, hal ini yang menjadikan hitungan angka rata-rata statistik (hitung kolektif) seperti GDP (*Gross Domestik Product*) dan GNP (*Gross National Product*) adalah persoalan penting bagi mereka; tanpa melihat orang per orang, apakah mereka sejahtera atau tidak. Karena yang diperhatikan adalah jumlah total produk nasional suatu negara.

Sementara, bila dilihat dalam perspektif ekonomi Islam, pendapat di atas sangat keliru. Menurut sistem ekonomi Islam, inti masalah ekonomi bukanlah kekurangan produksi, melainkan adalah masalah distribusi. Sebagaimana dikemukakan oleh al-Maliki: “persoalan ekonomi bukanlah kekurangan sumber daya alam (*resources*) yang tersedia, karena sumber daya itu cukup disediakan oleh Allah SWT (QS. Hud [11]: 6), tetapi terletak pada cara mendistribusikan sumber daya itu kepada seluruh manusia. Sebab, sebanyak apa pun barang dan jasa yang tersedia, tanpa adanya pola distribusi yang tepat, dan pembatasan konsumsi, tetap akan timbul masalah kekurangan bagi yang lain”³

Dengan demikian, makna distribusi dalam ekonomi Islam sangatlah luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan⁴. Dimana, Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masingnya kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya, dan kaidah-kaidah untuk *warisan*, *hibah* dan *wasiat*. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik

³ Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, (terj) oleh Ibnu Sholah al-Izzah, (Jakarta: Izzah, 2001), h. 19.

⁴ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al Khatab*. (Jakarta: Pustaka a-Kautsar Group 006), h. 125.

dalam distribusi pemasukan, baik antar unsur–unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok–kelompoknya, dan pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.

Adapun dasar hukum distribusi menurut ekonomi Islam adalah:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah” (TQS. at-Taubah [9]: 58)⁵.

Allah SWT juga berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٩﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (TQS. al-Hasyr [59]: 7)⁶.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2001), Cet. Ke-5, h. 197.

⁶ *Ibid*, h. 546.

Karena memperhatikan bahayanya pendistribusian harta yang bukan pada haknya dan terjadinya penyelewengan distribusi pada jalannya yang benar ini, maka Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang terlihat dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya nash al-Qur'an dan hadits Nabawi yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskan sistem manajemen, himbuan komitmen dan cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan penyimpangan dari sistem yang benar.
2. Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya.
3. Banyaknya dan komprehensifnya system dan cara distribusi yang ditegakkan dalam Islam, baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun yang secara suka rela (sunnah).
4. Al-Qur'an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan peringatan perbedaan di dalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusatan harta dalam kalangan minoritas.
5. Dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu, tema distribusi mendapat porsi besar yang dijelaskan dalam kepemimpinannya, yakni dalam perkataannya, “Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang akan selalu kalian dalam kebaikan selama kalian komitmen kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum, dan adil dalam pendistribusian.”

B. KRITERIA MASYARAKAT MISKIN

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat⁷.

Dalam menjalankan program tersebut, perlunya menetapkan beberapa kriteria dari masyarakat yang menjadi sasaran program raskin. Dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa kriteria sama dengan kriterium, kadar, ukuran dan sebagainya untuk mempertimbangkan atau menentukan sesuatu.⁸ Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 14 kriteria dari masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM), yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu / kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik

⁷ (www.pnpm-mandiri.org/elibrary/download.php?id=15)

⁸ Dessy Anwar, *Op. Cit*, h. 243.

6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai /air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD/ hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga miskin⁹

Selanjutnya, dalam mengukur tingkat kemiskinan di masyarakat, Indonesia (dalam hal ini BPS) menghitung pengeluaran minimal untuk mengonsumsi 2.100 kalori per orang per hari. BPS juga menghitung pengeluaran minimal untuk perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan

⁹ <http://infopetadaerah.blogspot.com/2010/07/ada-14-kriteria-yang-dipergunakan-untuk.html/24/10/2011//>

banyak lagi. Tiap tahun angka ini selalu direvisi, disesuaikan dengan kenaikan harga. Pendekatan ini telah dilakukan BPS sejak 1970-an¹⁰.

Dengan pendekatan ini, BPS menghasilkan angka 35 juta orang miskin untuk 2010. Namun, lembaga internasional seperti Bank Dunia harus mendapatkan kriteria yang dapat digunakan untuk memperbandingkan tingkat kemiskinan di semua negara di dunia. Kalau tiap negara menggunakan kriteria masingmasing, Bank Dunia tidak dapat melakukan perbandingan antarnegara. Pada 1990, Bank Dunia pernah membuat kriteria bahwa semua individu dengan pengeluaran di bawah USD1 dikatakan miskin. Angka USD1 disebut garis kemiskinan internasional¹¹.

Angka ini diperoleh dengan mempelajari garis kemiskinan di banyak negara dan Bank Dunia berpendapat bahwa USD1 telah dapat mewakili garis kemiskinan yang digunakan di banyak negara. Dengan kenaikan harga, Bank Dunia juga menaikkan garis kemiskinan internasional tersebut. Sekarang mereka menggunakan ukuran USD2 untuk garis kemiskinan internasional. Angka ini lebih tinggi dari garis kemiskinan di Indonesia, yang sekira USD1,5 per orang per hari. Dengan kriteria tersebut, Bank Dunia mencatat terdapat 100 juta orang miskin di Indonesia¹².

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam perspektif BULOG, BPS (Pemerintah) dan Bank Dunia, di mana untuk mengukur tingkat kemiskinan di masyarakat berdasarkan asumsi-asumsi dari data-data yang dihitung secara nasional dengan kriteria tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan. Bila dari kriteria dan perhitungan berdasarkan asumsi

¹⁰ <http://economy.okezone.com/24/10/2011//>

¹¹ <http://economy.okezone.com/24/10/2011//>

¹² <http://economy.okezone.com/24/10/2011//>

yang telah ditetapkan, ada di antara masyarakat tergolong kepada kriteria tersebut, maka mereka dapat dikategorikan rumah tangga miskin (RTM).

Hal ini berbeda dengan kriteria miskin dalam perspektif ekonomi Islam, di mana dalam menetapkan standar atau kriteria kemiskinan dilihat dari individu di suatu Negara. Bila individu tersebut mampu dan terpenuhi kebutuhan pokok (*basic need*), maka penduduk dapat dikatakan sejahtera. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan¹³. Menurut Abu a'al al-Maududi, masyarakat tidak terkategori kepada miskin, ketika memenuhi lima kriteria yang ditetapkan, yaitu (1) terpenuhi kebutuhan sandang, (2) terpenuhi kebutuhan pangan, (3) terpenuhi papan, (4) pendidikan, dan (5) kesehatan¹⁴. Selanjutnya, bila mereka mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan/atau tersier dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT, maka mereka tergolong masyarakat yang makmur.

C. URGENSI DAN TUJUAN DISTRIBUSI

Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum dapat kami katakan bahwa sistem distribusi ekonomi dalam ekonomi Islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya; dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam¹⁵. Dimana, tujuan

¹³ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam*, (terj), Hafiz Abdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2010), h. 69-70.

¹⁴ <http://www.ustsarwat.com/search.php?id=1171532969/24/10/2011//>

¹⁵ Abdurrahman al-Maliki, *Op.Cit*, h. 21.

distribusi dalam ekonomi Islam dikelompokkan kepada beberapa tujuan, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Dakwah.

Yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepada Islam itu sendiri. Misalnya, bagian muallaf di dalam zakat, dimana mereka adanya yang berasal dari orang kafir, yang diharapkan ke-Islaman-nya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang di harapkan kuat ke-Islamannya. Sebagaimana sistem distribusi dalam *ghanimah* dan *fa'i* juga memiliki tujuan dakwah yang jelas.¹⁶

Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Sebab Allah berfirman:

إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ
نُذِرُ لَهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

Artinya: “Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada' dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim” (TQS. ali Imran [3]: 140)¹⁷.

Di dalam tafsir *Fathu al-Qadir* Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa orang-orang yang menyerahkan sebagian harta mereka karena

¹⁶ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op.Cit*, h. 216.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 67.

Allah SWT itu berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah yang lain sebagai bentuk pelatihan¹⁸.

2. Tujuan Pendidikan¹⁹.

Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang di sebutkan dalam firman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui” (TQS. at-Taubah [9]: 103)²⁰.

Dari dalil di atas, menurut As-Sa’adi dalam *Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan* diterangkan bahwa zakat yang merupakan cara pengembalian distribusi dapat memberikan para pemberinya diri dosa dan akhlak tercela, menambahkan akhlak baik dan amal shaleh, mengembangkan harta dan menambahkan pahala di dunia dan akhirat²¹.

Di samping itu, secara umum dalam perspektif ekonomi Islam bahwa beberapa tujuan distribusi dalam pendidikan, adalah sebagai berikut:

¹⁸ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Fathu al-Qadir al-Jami’ Baina Fanay ar-Riwayah wa ad-Dirayah min Ilmi at-Tafsir*, Tahqiq Abdurrahman Umairah, (Mesir: Dar al-Wafa’ al-Manshurah, 1418H/1997 M), cet. Ke-2, h. 485.

¹⁹ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op.Cit*, h. 216.

²⁰ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 203.

²¹ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1417 H/ 1996 M), Cet. Ke-2, h. 308.

- a. Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain.
- b. Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan mementingkan diri sendiri (egois).

3. Tujuan Sosial.

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Dapat

di lihat pada Firman Allah SWT:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui” (TQS. al-Baqarah [2]: 273)²².

- b. Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat;
- c. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan berdampak pada terealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat, sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidak tentraman. Keadilan dalam distribusi mencakup tentang (1)

²² Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 46.

Pendistribusian sumber–sumber kekayaan; (2) Pendistribusian pemasukan diantara unsur–unsur produksi; (3) Pendistribusian diantara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang²³.

4. Tujuan Ekonomi.

Distribusi dalam ekonomi islam mempunyai tujuan–tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting diantaranya dapat kami sebutkan seperti berikut ini :

- a. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
- b. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa system distribusi dalam ekonomi islam dapat menghilangkan faktor – faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi ; seperti utang yang membebani pundak orang – orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi hamba sahaya.
- c. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara

²³ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op.Cit*, h. 217

individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan²⁴. Hal ini dapat dilihat firman Allah SWT:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَأْتَتْ أَكْطُفَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ
فَظَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾

Artinya: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya Karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat” (TQS. al-Baqarah [2]: 265)²⁵.

Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa orang-orang yang membelanjakan hartanya karena keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan kepadanya, sehingga setiap manusia terus tetap bertakwa kepada Allah SWT.

D. PENDISTRIBUSIAN PENDAPATAN

Konsep dasar kapitalis dalam permasalahan distribusi adalah kepemilikan *private* (pribadi). Makanya permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan, pendapatan, dan harta. Milton H. Spences menulis bahwa: “Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi

²⁴ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Op.Cit*, h. 218.

²⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 45.

ekonomi yang dicirikan oleh hak milik *privat* (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif”²⁶.

Sedangkan sosialis lebih melihat kepada kerja sebagai *basic* dari distribusi pendapatan. Setiap kepemilikan hanya bisa dilahirkan dari buah kerja seseorang, oleh sebab itu, adanya perbedaan dalam kepemilikan tidak disebabkan oleh kepemilikan pribadi tapi lebih kepada adanya perbedaan pada kemampuan dan bakat setiap orang. Briton menyebutkan bahwa “sosiolisme dapat diartikan sebagai bentuk perekonomian di mana pemerintah paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat, dan menjadikan industri-industri besar dan strategis yang menyangkut hidup orang banyak”²⁷.

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasari dalam system distribusi–redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi. Harus dipahami bahwa Islam tidak menjadikan *complete income equality* untuk semua umat sebagai tujuan utama dan paling akhir dari system distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk melihat secara

²⁶ Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Pengembangan)*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet. Ke-1, h. 74.

²⁷ Abdurrahman al-Maliki, *Op.Cit*, h. 23.

mendasar dari kesenjangan antar pendapatan yang dimiliki umat adalah sebuah keharusan.

Ada beberapa aspek dan merupakan pembagian pendistribusian pendapatan, yaitu:

1. Distribusi Pendapatan Dalam Rumah Tangga

Mengingat nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh proses aktifitas ekonomi harus dilandasi atas legalitas halal-haram; mulai dari produktivitas, hak kepemilikan, konsumsi, transaksi dan investasi. Aktivitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seorang muslim melaksanakan proses distribusi pendapatannya.

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi *shadaqoh*. Pengertian *shadaqoh* di sini bukan berarti sedekah dalam konteks pengertian bahasa Indonesia, akan tetapi sedekah dalam perspektif al-Qur'an. Dalam kamus bahasa Indonesia sedekah adalah derma kepada orang miskin dan sebagainya berdasarkan cinta kasih kepada sesama manusia²⁸.

Sementara sedekah dalam konteks terminologi al-Qur'an dapat dipahami dalam dua aspek, yaitu *shadaqad wajib* (wajib dan khusus dikenakan bagi orang muslim) seperti *nafaqah*, *zakat*, *udhiyyah*, *warisan*, *musa'adah*, *jiwar*, *diyafah*; dan sedekah *nafilah* (sunah dan khusus

²⁸ Dessy Anwar, *Op.Cit*, h. 409.

dikenakan bagi orang muslim) seperti *infaq*, *aqiqah*, *wakaf*. Di sisi lain, adanya permasalahan penting dalam pendistribusian pendapatan keluarga adalah instrumen term hukum (*had/ hudud*), seperti *kafarat*, *dam/diyat*, *nudzur*²⁹.

Dari uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa konsep pendistribusian pendapatan keluarga melalui sedekah merupakan konsep yang memiliki perbedaan yang signifikan antara ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya. Ekonomi Islam dalam mendistribusikan pendapatan rumah tangga mengenal skala prioritas yang ketat. Bahkan berkaitan dengan kewajiban zakat, ekonomi Islam memberikan sejumlah persyaratan (karakteristik khusus) pada aset wajib zakat tersebut. Dari kepemilikan aset yang dimiliki, pertama yang harus didistribusikan (dikeluarkan) dari jumlah seluruh asset adalah kebutuhan keluarga, dan didahulukan untuk membayar hutang.

Dengan demikian, setiap instrumen yang ditawarkan Islam dalam memecahkan permasalahan ketidaksetaraan pendapatan (*inequality income*) antar rumah tangga, pada dasarnya dapat disesuaikan dengan cara seseorang dalam mencari kekayaan, yaitu:

Pertama; fase akumulasi (*accumulation phase*), yaitu tahap awal sampai pertengahan karier. Pada fase ini individu mencoba meningkatkan asetnya (kekayaan) untuk dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek. Secara umum, pendapatan bersih dari individu dalam fase ini tidaklah besar. Untuk itu, ekonomi rumah tangga dapat menfokuskan

²⁹ Muhammad Nasuiton, *Pengenalan Eksekutif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), h. 73.

pengeluarannya khusus untuk meningkatkan produktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya.

Kedua; fase konsolidasi (*consolidation phase*) adalah Individu yang berada dalam fase ini biasanya telah melalui pertengahan perjalanan kariernya,. Dalam fase ini biasanya pendapatan melebihi pengeluaran. Mereka yang ada di fase ini dapat meninvestasikan dananya untuk tujuan jangka panjang. Untuk itu, pada setiap kelebihan asetnya, individu dapat melakukan kewajiban zakat dan instrument-intrumen lainnya yang lebih terkait kepada perayaan rasa syukur.

Ketiga, *spending phase*. Fase ini secara umum dimulai pada saat individu memasuki masa pension. Kebutuhan akan biaya hidup harian mereka peroleh dari investasi yang mereka lakukan pada dua fase sebelumnya. Pada fase ini, kewajiban untuk memberikan nafkah keluarga akan berkurang, seiring dengan semakin dewasanya anak yang menjadi tanggungan³⁰.

2. Distribusi Pendapatan Dalam Negara

Prinsip prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Para sarjana muslim banyak membicarakan objektivitas perekonomian berbasis Islam pada level Negara; di antaranya terkait dengan penjaminan level minimum kehidupan bangsa bagi mereka yang berpendapatan di bawah kemampuan.

³⁰ <http://www.syabab.com//16-05-2011//> tentang jurnal ekononmi

Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemanfaatan sebesar-besarnya atas sumber daya yang tersedia. Karena itu negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi, kesetaraan, ketenagakerjaan, pembangunan sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Di samping itu, dalam pendistribusian pendapatan negara, sangat diperlukan model politik ekonomi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah yang berdampak secara langsung dan tidak langsung kepada distribusi pendapatan, seperti anggaran pendapatan dan belanja Negara, kebijakan fiskal dan moneter dengan basis hipotesis kepada ketidaksempurnaan pasaran teori-teori, yang berkaitan dengan *moral hazard* dan *adverse selection*.

Ada beberapa bentuk dari politik ekonomi dalam Islam yang mengatur tentang pendistribusian pendapatan negara, yaitu:

a. Pengelolaan Sumber Daya

Dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia, pemerintah (Negara) harus mampu mendistribusikan secara baik atas pemanfaatan tanah/lahan dan industri. Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan penggunaan lahan yang merupakan salah satu dari kepemilikan umat (*milku al-'aam*) untuk kepentingan Negara dan publik (hak *hima*), distribusi tanah (*hak iqta*) kepada sektor swasta, penarikan pajak, subsidi, dan keistimewaan *non monetary* lain, yang legalitasnya dikembalikan kepada aturan syari'ah. Semua keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi

kepentingan publik dan membebaskan kemiskinan dari perekonomian masyarakat.

Di samping itu, dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah; sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Ghazali di antaranya termasuk dalam hal meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan (*muhafazhah ala al-aqidah*), kehidupan (*muhafazhah ala al-nafs*), intelektualitas (*muhafazhah ala al-'aql*), kekayaan dan kepemilikan (*muhafazhah ala al-maal*). Secara historis, pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum Muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal, yang diselenggarakan pada lembaga *baitul maal* (*national treasury*)³¹.

Dari berbagai macam instrumen dalam negara, pajak diterapkan atas individu (*jizyah* dan *pajak khusus Muslim*), tanah *kharaj*, dan *ushur* (cukai) atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi, maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum muslimin. Misalnya, krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin otomatis mereka tidak dikenai beban pajak baik *jizyah* maupun pajak atas orang Islam,

³¹ [http://www.syabab.com//16-05-2011//tentang jurnal ekononmi](http://www.syabab.com//16-05-2011//tentang%20jurnal%20ekonomi).

sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang muslim yang kaya tersebut³².

Dalam ekonomi Islam juga dikenal adanya konsep zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan lain-lain (ZISWA). Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat dalam syariah Islam, guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝١٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (TQS. at-Taubah [9]: 60)³³.

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat delapan mustahiq yang berhak mendapatkan pembagian zakat. Adapun infaq, sadaqah, wakaf merupakan bentuk pengeluaran dengan ‘sukarela’ yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian ZISWA merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat dan ada pula yang bersifat sukarela seperti sadaqah, infaq dan waqaf.

³² Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khialafah* (terj), Ahmad S, dkk, (Jakarta: HTI Press, 2009), Cet. Ke-1, h. 26-27.

³³ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 196.

Pembagian dalam kegiatan ‘wajib’ dan ‘sukarela’ ini khas di dalam sistem ekonomi Islam, yang membedakannya dari sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar tidak ada ‘sektor sukarela’

b. Peran Negara Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Raskin

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dilakukan harus berdasarkan kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam kaitan dengan kewajiban Negara memenuhi kebutuhan warga, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 yang berbunyi: “*fakir miskin, anak yatim dan orang-orang terlantar dipelihara oleh Negara*”.³⁴

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan. Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya-upaya tersebut telah dicantumkan menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM pada bulan Maret rata-rata 29% dan Oktober 2005 hingga mencapai 126% membuat masyarakat gelisah dalam memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari. Dampak dari kebijakan tersebut dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang berada pada garis kemiskinan.

³⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri³⁵.

Pemerintah berupaya mengedepankan peran partisipasi masyarakat dengan mengacu pada teori *Bottom-Up*. Dalam hal ini pemerintah berharap masyarakat dapat terpacu untuk bisa menembus perangkap kemiskinan yang melekat pada dirinya sehingga dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin. Salah satunya adalah dengan dicanangkannya Program Raskin.

Program Raskin pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diluncurkan pada Juli 1998 di bawah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Beberapa penyesuaian yang telah dilakukan antara lain meliputi perubahan nama, jumlah beras per rumah tangga, frekuensi distribusi, sumber dan jenis data sasaran penerima manfaat, dan penyediaan lembaga pendamping³⁶.

³⁵ <http://economy.okezone.com/24/10/2011//>

³⁶ <http://economy.okezone.com/24/10/2011//>

Pada 2002, pemerintah mengganti nama OPK (Operasi Pasar Khusus) menjadi Program Raskin agar lebih mencerminkan sifat program, yakni sebagai bagian dari program perlindungan sosial bagi RTM (Rumah Tangga Miskin), tidak lagi sebagai program darurat penanggulangan dampak krisis ekonomi. Penetapan jumlah beras per bulan per RTM yang pada awalnya 10 kg, selama beberapa tahun berikutnya bervariasi dari 10 kg hingga 20 kg, dan pada 2009 menjadi 15 kg. Frekuensi distribusi yang pada tahun-tahun sebelumnya 12 kali, pada 2006 berkurang menjadi 10 kali, dan pada 2007 sampai sekarang ini kembali menjadi 12 kali per tahun. Sasaran penerima manfaat yang sebelumnya menggunakan data keluarga prasejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera 1 (KS-1) alasan ekonomi hasil pendataan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), sejak 2006 berubah menggunakan data RTM hasil pendataan BPS (Badan Pusat Statistik)³⁷.

E. MODEL EKONOMI POLITIK

Para ekonom muslim sudah mengilustrasikan secara jelas bahwa ajaran Islam memiliki orientasi dan model kebijakan ekonomi tersendiri. Model kebijakan politik ekonomi Islam (*as-Siyasah al-Iqtishodiyah*) bersifat statis dan berkembang pada waktu yang bersamaan. Selain itu kebijakan ekonomi politik Islam melayani kesejahteraan materi dan kebutuhan spiritual. Kebijakan ini akan sangat memperhatikan setiap aktivitas ekonomi individu

³⁷ www.pnpm-mandiri.org/elibrary/download.php?id=15

maupun kelompok, selama aktivitas ini hanya dalam perencanaan dan orientasi hanya kepada Allah SWT. (Kesalehan) lebih dari itu *reward* akan diberikan kepada aktivitas tersebut sebesar pemanfaatannya terhadap seluruh komunitas secara umum. Dalam Islam tidak dikenal adanya konflik antara materi dan jiwa, dan tidak ada pemisahan antara ekonomi dan Negara³⁸.

Dalam sejarah Islam aspek ekonomi politik yang dilakukan oleh khalifah adalah dalam rangka mengurus dan melayani umat, sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil.

Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrument dalam kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada Baitul Maal (kas negara). Dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan atas individu (*jizyah* dan pajak khusus muslim), tanah *kharaj*, dan *usyr* (cukai) atas barang impor dari Negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani; di Baitul Maal terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Bagian pemasukan; bagian ini meliputi tiga diwan yaitu Pos *Fa'i* dan Kharaj, terdiri dari *ghanimah*, *kharaj*, *tanah-tanah*, *jizyah*, *fa'i* dan *pajak*; Pos Kepemilikan Umum, terdiri dari minyak bumi, gas listrik, barang tambang, laut, sungai, selat, mata air, hutan, padang gembalaan, hima dan sebagainya. Pos Zakat, meliputi zakat uang, komoditas perdagangan, pertanian dan buah-buahan, unta, sapi, dan domba.

³⁸ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 dan 15/DSN-MUI/IX/2000.

2. Bagian pembelanjaan. Pada bagian ini meliputi delapan diwan, yaitu pos dar al-Khilafah, pos kemaslahatan negara, pos subsidi, pos jihad, pos pengelolaan zakat, pos pengelolaan kepemilikan umum, pos keperluan darurat, dan pos anggaran, pengontrolan dan pengawasan umum³⁹.

³⁹ Hizbuttahri, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)* (terj), Yahya AR, (Jakarta: HTI Press, 2008), Cet. Ke-3, h.238-239

BAB IV

PEMBAHASAN

A. SISTEM PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN)

Setelah melakukan penelitian dan diperoleh data-data yang dibutuhkan, selanjutnya data-data tersebut diklasifikasi sesuai kebutuhannya, sehingga diperoleh berbagai gambaran hasil dari penelitian yang dilaksanakan. Dari hasil penelitian dilakukan, bahwa di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir bahwa masyarakat kurang mampu mendapatkan bantuan Raskin dari pemerintah. Dan bantuan tersebut diterima masyarakat secara langsung, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 1
Pendistribusian Secara Langsung

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ya	35	100%
2	Tidak	-	-
	Jumlah	35	100%

Sumber Data: *Olahan Angket Penelitian, Mei 2011.*

Dari tabel di atas, dapat dipahami bahwa dari 35 orang responden maka keseluruhannya adalah 35 orang dengan persentase 100% menjawab Raskin diterima masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir secara langsung. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat juga dipahami bahwa Raskin diterima masyarakat tidak secara bertahap. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Halimah, sebagai berikut:

“Bantuan Raskin yang diberikan pemerintah kepada masyarakat secara langsung. Dengan demikian, apabila masyarakat memiliki kertas kupon, maka ia berhak mendapatkan bantuan tersebut ketika diumumkan oleh pejabat berwenang tentang waktu pembagian beras miskin”¹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Halimah di atas dapat dipahami bahwa masyarakat yang mendapatkan bantuan beras miskin ketika mereka memiliki kupon dari pejabat berwenang. Adapun besarnya bantuan Raskin yang diterima masyarakat bervariasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 2
Besarnya Bantuan Raskin

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	< 10 Kg	5	14%
2	10 Kg	21	60%
3	> 10 Kg	9	26%
	Jumlah	35	100

Sumber Data: *Olahan Angket Penelitian, Mei 2011.*

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 35 orang responden, dimana 5 orang responden dengan persentase 14% menjawab besarnya Raskin yang diterima masyarakat < 19 Kg, 21 orang responden dengan persentase 60% menjawab besarnya Raskin yang diterima masyarakat sebanyak 10 Kg, dan 9 orang responden dengan persentase 26% menjawab besarnya Raskin yang diterima masyarakat > 10 Kg. Dari tabel IV. 2 tentang besarnya bantuan Raskin, maka dapat diketahui bahwa mayoritas responden di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir menjawab bahwa besarnya bantuan Raskin yang diterima masyarakat adalah sebesar 10 Kg.

¹ Halimah, (Masyarakat: Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir), *wawancara*, 15 Mei 2011.

Di samping itu, dari tabel di atas terlihat jelas bahwa tidak keseluruhan dari responden memberikan jawaban yang sama yaitu 35 orang dengan persentase 100%. Hal ini disebabkan oleh pengalaman masyarakat tentang besarnya bantuan Raskin yang mereka terima. Dalam hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Baharum, adalah:

“Besarnya raskin yang kami terima dari waktu ke waktu mengalami penyusutan. Karena mulanya kami menerima bantuan Raskin seberat 35 Kg, 10 Kg, dan sekarang bantuan Raskin yang kami terima hanya seberat 8 Kg. Dan kami berharap bantuan Raskin yang kami terima sekarang tidak berkurang dari 8 Kg. Karena, bila bantuan masih mengalami penyusutan lagi dari besar yang kami terima sekarang, maka apa yang telah dilakukan pemerintah kurang bermakna”².

Di samping itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Serigani penyusutan besarnya beras Raskin yang diterima masyarakat kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan ketetapan dari RT dengan mendistribusiakan secara merata dari jumlah masyarakat miskin. Sehingga, diharapkan tidak ada masyarakat yang miskin tidak mendapatkan hak-hak mereka. Sehingga, dari jumlah beras yang ditetapkan untuk Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dan dibagi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besarnya yang diperoleh masyarakat yaitu 8 Kg per Kepala Keluarga (KK)³.

Dari hasil wawancara dengan Baharum dapat dipahami bahwa masyarakat kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sangat mengaharapkan bantuan beras miskin dari pemerintah, meskipun bantuan yang diberikan tidak secara gratis. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

² Baharum (Masyarakat: Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir), *wawancara*, 17 Mei 2011.

³ Serigani (Ketua RT 11 RW 04 Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir), *wawancara*, 16 Mei 2011.

Tabel IV. 3
Pendistribusian Secara Gratis

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	35	100%
	Jumlah	35	100%

Sumber Data: *Olahan Angket Penelitian, Mei 2011.*

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 35 orang responden, dimana keseluruhan dari mereka menjawab “tidak” yaitu 35 orang responden dengan persentase 100%. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bantuan beras miskin yang diterima masyarakat Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir tidak secara gratis.

Menurut Arniati; masyarakat kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang namanya terdata mendapatkan bantuan Raskin, harus membayarnya sesuai yang dibutuhkan. Adapun harga satu kilogram beras Raskin adalah sebesar Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) per kilogram. Dan masyarakat tidak mendapatkan bantuan Raskin tersebut, ketika mereka tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya.”⁴.

Dari hasil wawancara dengan Arniati, dapat dipahami bahwa harga Raskin yang harus dibayar masyarakat kurang mampu seharga Rp. 2.200 per kilogram. Bila dilihat dari harga yang ditetapkan, dimana berbeda dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Rp. 1.600 per kilogram. Adapun perbedaan (selisih harga) disebabkan adanya keperluan lain dari pihak pengelola dalam rangka mensukseskan pendistribusian Raskin di masyarakat Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut:

⁴ Arniati (Masyarakat: Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir), wawancara, 15 Mei 2011.

Menurut Serigani, harga yang ditetapkan oleh Pemerintah per kilogram dari beras Raskin adalah Rp. 1.600,- Hanya saja, nominal tersebut hanya harga beras yang ditetapkan tidak termasuk biaya operasional keperluan pendistribusian, seperti membeli kertas, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kami berinisiatif menetapkan harga Rp. 2.200,- untuk tambahan biaya operasional yang dibutuhkan. Namun, besarnya harga tersebut ternyata masyarakat tidak merasa keberatan, bila dibandingkan dengan harga beras yang biasa mereka beli di pasar, yang sejenis dengan Raskin, yaitu Rp. 5.500,-⁵.

Hasil hasil wawancara dengan Arniati tentang harga per kilogram dari beras miskin yang diterima masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir maka dapat dipahami bahwa bentuk bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk harga murah. Bantuan tersebut tidak diberikan secara gratis, meskipun demikian masyarakat merasa bahwa bantuan tersebut sangat membantu perekonomian mereka. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel IV. 4
Pendistribusian Raskin Sangat Membantu Masyarakat

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ya	19	54%
2	Kurang	14	40%
3	Tidak	2	6%
	Jumlah	35	100%

Sumber Data: *Olahan Angket Penelitian, Mei 2011*

Tabel IV. 4 di atas memberikan informasi bahwa dari 35 orang responden, ternyata 19 orang responden dengan persentase 54% menjawab “Ya”, 14 orang responden dengan persentase 40% menjawab “Kurang”, dan 2

⁵ Serigani (Ketua RT 11 RW 04 Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir), *wawancara*, 16 Mei 2011.

orang responden dengan persentase 6% menjawab “Tidak”. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa lebih dari 50% dari responden menjawab “Ya” yaitu 19 orang responden (54%). Sehingga, dari jawaban tersebut dapat juga dipahami bahwa masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir merasa terbantu dengan Raskin yang diberikan pemerintah.

Di samping itu, pejabat berwenang dalam memberikan bantuan beras miskin kepada masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan data dari RT (Rukun Tetangga). Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 5
Pendistribusian Berdasarkan Data Dari RT

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ya	35	100%
2	Tidak	-	-
	Jumlah	35	100%

Sumber Data: *Olahan Angket Penelitian, Mei 2011*

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa keseluruhan dari responden menjawab “Ya” yaitu berjumlah 35 orang responden dengan persentase 100%. Dengan mayoritas responden menjawab “Ya” pada tabel di atas, maka dapat dipahami bahwa masyarakat yang mendapat bantuan beras miskin dari pemerintah di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir setelah melalui pendataan dari RT (rukun tetangga). Data tersebut sebagai pedoman bagi pejabat berwenang dalam memberikan bantuan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan pendataan dari RT (rukun

tetangga) setempat, diharapkan bantuan yang diberikan sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Untuk mengetahui pendistribusian bantuan Raskin yang diberikan kepada masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan kriteria yang diinginkan, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 6
Pendistribusian Sesuai Kriteria

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Sesuai kriteria	11	31%
2	Kurang sesuai kriteria	16	44%
3	Tidak sesuai kriteria	9	25%
	Jumlah	36	100%

Sumber Data: *Olahan Angket Penelitian, Mei 2011*

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 35 orang responden ternyata 11 orang responden dengan persentase 31% menjawab “sesuai kriteria”, 11 orang responden menjawab “kurang sesuai kriteria” dengan persentase 44%, dan 9 orang responden menjawab “tidak sesuai kriteria” dengan persentase 25%. Dari persentase jawaban tersebut, maka dapat dipahami bahwa pendistribusian beras miskin di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir kurang sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Hal ini sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Arniati, yaitu:

“Bantuan Raskin yang diberikan kepada kami belum memenuhi kriteria yang diinginkan, karena masih ditemukan adanya masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan bagian Raskin tersebut. Adanya di antara masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan Raskin dan dibuktikan dengan tidak mendapatkan kupon dari RT. Adanya masyarakat kurang mampu mendapatkan kupon beras. Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membeli dengan harga yang ditetapkan, sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut”⁶.

⁶ Arniati (Masyarakat: Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir), wawancara, 15 Mei 2011.

Hasil wawancara dengan Arniati; sehingga dapat dipahami bahwa kurang terdistribusinya Raskin sesuai kriteria yang diinginkan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor administrasi; Yang bersangkutan tidak memiliki kertas kupon sebagai bukti sah untuk mendapatkan bantuan beras miskin,
2. Faktor ekonomi; faktor ini disebabkan ketidakmampuannya dalam mengganti Raskin dengan harga yang ditentukan, sehingga meskipun mereka terdata oleh pejabat berwenang (RT) berhak mendapatkan bantuan tersebut, namun hak yang dimiliki secara otomatis hilang.

Dari dua faktor di atas serta berdasarkan hasil wawancara dengan Arniati, peneliti berpendapat tidak meratanya pendistribusian Raskin kepada masyarakat kurang mampu disebabkan dalam pendistribusian ada kemungkinan tidak menggunakan kriteria yang benar (dipengaruhi oleh kekeluargaan, kerabat, faktor ekonomi). Di samping itu, adanya masyarakat yang tidak mampu untuk membeli. Selanjutnya, ketidaksesuaian kriteria bagi masyarakat penerima Raskin dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel IV. 7
Setiap Masyarakat Kurang Mampu
Mendapatkan Bantuan Raskin

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	35	100%
	Jumlah	35	100%

Sumber Data: *Olahan Angket Penelitian, Mei 2011*

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari 35 orang responden, dimana tidak ada di antara responden yang menjawab “Ya”, sementara 35 orang responden dengan persentase 100% menjawab “Tidak”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak semua masyarakat kurang mampu yang mendapatkan bantuan Raskin dari pemerintah. Hal ini didukung dengan hasil wawancara penulis dengan Baharum yang menjelaskan tentang banyaknya masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan Raskin, sebagai berikut:

Bila dilihat bentuk pendistribusian Raskin kepada masyarakat miskin, sehingga bisa dirata-ratakan periode ini ± 117 orang dari masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan Raskin dari pemerintah. Bila dipersentasekan dari jumlah masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, maka $\pm 9\%$ (persen) dari 1.288 orang masyarakat yang dikategorikan kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang tidak mendapatkan bantuan beras miskin.

B. STANDAR MASYARAKAT YANG BERHAK MENDAPATKAN BANTUAN BERAS MISKIN (RASKIN)

Dalam kamus bahasa Indonesia ditemukan bahwa kata “kriteria” sama dengan “kriterium”, memiliki makna yaitu “kadar; ukuran; patokan dan sebagainya untuk mempertimbangkan atau menentukan sesuatu”⁷. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa kriteria merupakan patokan atau ukuran pertimbangan dalam menentukan suatu keputusan. Adapun kaitannya dengan pendistribusian Raskin kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat dipahami bahwa pedoman dalam menentukan siapa yang berhak dalam mendapatkan bantuan beras miskin dari pemerintah.

⁷ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h. 243.

Sekilas telah disinggung tentang siapa yang berhak dalam mendapatkan bantuan Raskin, yaitu masyarakat di suatu tempat yang memiliki taraf ekonomi kurang mampu. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV. 8
Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan Raskin

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Masyarakat mampu	10	29%
2	Masyarakat Kurang/ Tidak Mampu	25	71%
	Jumlah	35	100%

Sumber Data: *Olahan Angket Penelitian, Mei 2011*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang mendapat bantuan Raskin adalah “mampu” berjumlah 10 orang responden dengan persentase 29%. Masyarakat “tidak mampu” berjumlah 25 orang responden dengan persentase 71%. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa bantuan Raskin yang merupakan hak dari masyarakat kurang mampu, namun hak tersebut juga dimiliki oleh masyarakat yang berekonomi mampu. Hal ini terlihat dari adanya responden yang menjawab adanya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan Raskin, adalah 10 orang (29%). Dari hasil wawancara penulis dengan responden; yang menyebabkan masyarakat mampu mendapatkan bantuan Raskin disebabkan oleh faktor kedekatan dengan pengurus pendistribusian dan kemampuan ekonomi. Dengan kemampuan ekonomi tersebut, mereka dapat membeli Raskin yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat yang tidak mampu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Serigani, ketetapan kriteria dari masyarakat yang digolongkan kepada tidak masyarakat tidak mampu berdasarkan pertimbangan dari RT setempat dengan melihat faktor-faktor yang mendorong, sehingga mereka dapat dikatakan miskin, seperti rendahnya penghasilan per bulan⁸.

Selanjutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dimana pemerintahan menetapkan bahwa standar masyarakat dikatakan miskin (kurang mampu) ketika memiliki penghasilan di bawah \$ 2 dollar per hari⁹. Berdasarkan standar tersebut, selanjutnya bila disepakati bahwa \$ 1 dollar sama dengan Rp. 10.000,- maka penghasilan masyarakat di bawah Rp. 20.000,- maka masyarakat tersebut tergolong kepada masyarakat miskin (kurang mampu). Dengan demikian, untuk mengetahui standar kemiskinan masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 9
Kriteria Masyarakat Kurang Mampu
adalah Penghasilan Perbulan

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ya	35	100
2	Tidak	-	-
	Jumlah	35	100%

Sumber Data: *Olahan Angket Penelitian, Mei 2011*

⁸ Serigani (Ketua RT 11 RW 04 Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir), *wawancara*, 16 Mei 2011.

⁹ <http://www.okezone.com//21/5/2011-Jam 19.15 Wib//>

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 35 responden dimana keseluruhan responden menjawab “Ya” dengan persentase 100%. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penghasilan perbulan dalam keluarga adalah kriteria masyarakat kurang mampu dan mendapatkan bantuan Raskin. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Serigani sebagai berikut:

Kriteria ini merupakan kriteria utama dalam menetapkan tingkat kemampuan (ekonomi) masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Berdasarkan kriteria ini, dimana sebagian besar masyarakat yang telah mendapatkan bantuan beras miskin (Raskin) adalah mereka yang berpenghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- per bulan. Dengan penghasilan tersebut mereka mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Berdasarkan penghasilan yang dimiliki dalam sebulan, maka pihak berwenang (RT) menetapkan bahwa yang bersangkutan berhak mendapatkan bantuan Raskin¹⁰.

Di samping kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan Raskin di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dimana terdapat kriteria lain, sebagai berikut:

Tabel IV. 10
Kriteria Masyarakat Kurang Mampu
adalah Jumlah Tanggungan

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ya	35	100
2	Tidak	-	-
	Jumlah	35	100%

Sumber Data: *Olahan Angket Penelitian, Mei 2011*

¹⁰ Serigani (Ketua RT 11 RW 04 Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir), wawancara, 16 Mei 2011.

Pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 35 responden dimana keseluruhan responden menjawab “Ya” dengan persentase 100%. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tanggungan dalam keluarga adalah kriteria dari masyarakat kurang mampu dan mendapatkan bantuan Raskin. Hal ini didukung dengan hasil wawancara berikut ini:

Jumlah tanggung dalam keluarga merupakan kriteria kedua dalam menetapkan masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dapat dikategorikan kepada masyarakat kurang mampu. Kriteria ini memiliki hubungan erat dengan kriteria pertama. Karena dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- per bulan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di sisi lain, dilihat dari demografis bahwa Kepala Keluarga (KK) yang berdomisili di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir memiliki tanggungan minimal 6 orang, terdiri dari 1 orang isteri dan 5 orang anak. Dengan banyaknya tanggungan dalam keluarga, sementara kecilnya penghasilan dalam sebulannya (Rp. 1.000.000,-), sehingga menjadi suatu hambatan bagi Kepala Keluarga (KK) dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya¹¹.

Di samping itu, dari hasil observasi penulis di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dimana status perkawinan (Duda/ Janda) juga menjadi kriteria dari masyarakat kurang mampu dan mendapatkan bantuan Raskin, sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 11
Kriteria Masyarakat Kurang Mampu
adalah Status Perkawinan

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ya	35	100
2	Tidak	-	-
	Jumlah	35	100%

Sumber Data: *Olahan Angket Penelitian, Mei 2011*

¹¹ Serigani (Ketua RT 11 RW 04 Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir), wawancara, 16 Mei 2011.

Pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa dari 35 responden dimana keseluruhan responden menjawab “Ya” dengan persentase 100%. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa jumlah status perkawinan (Duda/ Janda) adalah kriteria dari masyarakat kurang mampu dan mendapatkan bantuan Raskin. Dari kesimpulan tabel di atas, diperkuat dengan hasil wawancara penulis, sebagai berikut:

Status perkawinan merupakan salah satu kriteria dalam menentukan standar masyarakat kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Adapun alasan menetapkan status perkawinan sebagai kriteria masyarakat kurang mampu dan berhak mendapatkan bantuan Raskin karena sebagian besar masyarakat yang berstatus janda/duda tidak lagi produktif dan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam hal ini, baik masyarakat yang berstatus Duda maupun janda senantiasa selalu mengharapkan bantuan dari anaknya. Sementara, dalam kehidupan sehari-hari yang bersangkutan tinggal sendiri (tidak bersama anaknya)¹².

Di samping itu, dari beberapa tabel angket dan hasil wawancara yang menjelaskan tentang kriteria masyarakat kurang mampu yang mendapatkan bantuan Raskin di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada tiga kriteria dari masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat kurang mampu, yaitu (1) Kriteria penghasilan; (2) Kriteria jumlah tanggungan; dan (3) Status Perkawinan (Duda/ Janda). Dari tiga kriteria di atas, merupakan kriteria yang telah ditetapkan aparat setempat (RT) dari masyarakat yang mendapatkan bantuan Raskin. Namun, fakta di lapangan ditemukan adanya masyarakat yang merasa tidak mendapatkan bantuan tersebut, sementara mereka memenuhi dari kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

¹² Serigani (Ketua RT 11 RW 04 Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir), wawancara, 16 Mei 2011.

Menurut Halimah; bahwa ia mengaku dan menyadari keluarganya termasuk kategori kurang mampu. Hal ini didukung juga dengan statusnya sebagai janda dengan penghasilan kurang dari Rp. 1000.000,- per sebulan. Sementara, ia memiliki 5 orang anak (tanggungan) yang masih sekolah. Namun, ia tidak mendapatkan bantuan raskin (beras miskin) tersebut. Akan tetapi, adanya di antara masyarakat yang tidak termasuk kategori miskin dengan penghasilan lebih dari Rp. 1.000.000,- per sebulan, mendapatkan bantuan tersebut¹³.

Selanjutnya, dari beberapa kriteria masyarakat yang dikategorikan kurang mampu dan mendapatkan bantuan Raskin sebagaimana dijelaskan pada tabel angket dan wawancara di atas, dimana tidak diwajibkan bagi masyarakat yang memiliki identitas diri (KK), sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 12
Identitas Diri (KK dan KTP)

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	Ya	-	-
2	Tidak	35	100%
	Jumlah	35	100%

Sumber Data: *Olahan Angket Penelitian, Mei 2011*

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa keseluruhan dari responden yaitu 35 orang responden dengan persentase 100% menjawab “Ya”. Dengan demikian dapat dipahami bahwa identitas diri berupa KK dan KTP tidak menjadi syarat utama bagi masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dalam mendapatkan bantuan beras miskin.

¹³ Halimah (Masyarakat: Kepenghuluan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir), wawancara, 15 Mei 2011.

Hasil wawancara dengan Tri Darmawati diperoleh suatu pemahaman bahwa identitas diri berupa KK dan KTP tidak menjadi ukuran untuk mendapatkan bantuan Raskin di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, banyaknya di antara masyarakat yang tidak memiliki identitas diri berupa KK dan KTP, namun mereka tetap berhak mendapatkan bantuan tersebut, selama keberadaannya diketahui dan diakui oleh RT setempat dan memenuhi syarat atau kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya¹⁴.

Berdasarkan uraian di atas, sehingga dapat dipahami bahwa setiap masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan keberadaannya dalam suatu wilayah kekuasaan RT diketahui dan diakui (terdaftar), maka yang bersangkutan berhak mendapatkan bantuan Raskin, meskipun mereka tidak memiliki identitas diri berupa KK dan KTP.

Adapun dalam kaitannya dengan masyarakat yang mendapatkan bantuan raskin di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah masyarakat yang memiliki taraf ekonomi kurang mampu (masyarakat miskin).

Menurut hasil wawancara dengan RT di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang memiliki penghasilan Rp. 1.000.000,-
2. Tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap
3. Status perkawinan (Janda) dan memiliki tanggungan.¹⁵

¹⁴ Tri Darmawati (Masyarakat: Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir), *wawancara*, 16 Mei 2011.

¹⁵ Serigani (Ketua RT 11 RW 04 Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir), *wawancara*, 16 Mei 2011

Selanjutnya, bagi masyarakat di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang berhak mendapatkan bantuan Raskin, maka secara administrasi yang bersangkutan akan mendapatkan kartu peserta penerima bantuan Raskin yang secara sah dikeluarkan oleh petugas kelurahan dan dibagikan oleh RT setempat. Dalam hal ini, ketika bantuan Raskin diterima oleh pihak petugas berwenang dan selanjutnya dibagikan kepada masyarakat kurang mampu. Untuk mengetahui petugas yang berwenang dalam proses pembagian bantuan Raskin kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 13
Petugas Penyerah Raskin

No	Indikator	Jumlah	Persentase
1	RT (Rukun Tetangga)	-	-
2	Petugas dari Kelurahan	35	100%
3	RT dan disaksikan oleh Petugas Kelurahan	-	-
	Jumlah	35	100%

Sumber Data: *Olahan Angket Penelitian, Mei 2011*

Berdasarkan tabel di atas, sehingga dapat diketahui bahwa dari 35 orang responden, dimana 35 orang responden dengan persentase 100% menjawab bahwa bantuan Raskin diserahkan oleh petugas dari Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, sementara tidak ada di antara responden menjawab bantuan Raskin diserahkan oleh RT (rukun tetangga) atau diserahkan oleh RT (rukun tetangga) dan disaksikan oleh petugas dari Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan

Hilir. Dalam hal ini dapat juga dipahami bahwa RT (rukun tetangga) berkontribusi dalam mendata dan mensuply data kepada petugas kelurahan, selanjutnya data tersebut menjadi dasar pihak Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dalam mendistribusikan bantuan Raskin.

C. ANALISIS EKONOMI ISLAM

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatur hubungan antara manusia dengan Khaliq, dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan sesama. Hubungan manusia dengan Khaliq mengatur masalah aqidah dan ibadah, dengan dirinya sendiri mengatur masalah makan dan minum, berpakaian, dan akhlak; adapun hubungan manusia dengan sesama mengatur masalah muamalah dan *uqubat* (sanksi).¹⁶

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat tiga hubungan yang diatur di dalam Islam, yaitu (1) hubungan dengan Allah SWT (*hablun mina Allah*), (2) hubungan dengan diri sendiri (*hablun min al-Nafs*), dan (3) hubungan dengan sesama manusia (*hablun min an-Naas*). Dengan demikian, sejalan dengan firman Allah SWT yang memerintahkan untuk mengamalkan Islam secara keseluruhan (totalitas):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

¹⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizhamu al-Islam*, (terj), Abu Amin, dkk, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Bogor: Thariqul Izzah, 2001), Cet. Ke-5, h. 181.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (TQS. al-Baqarah [2]: 208).¹⁷

Di samping itu, dari pengertian Islam di atas, dapat juga dipahami bahwa Islam mengatur masalah ekonomi termasuk dalam hal pendistribusian. Dan dalam ekonomi Islam menitikberatkan dan lebih mengutamakan pembahasannya dalam masalah distribusi.

Distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat¹⁸. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa distribusi merupakan salah satu kegiatan dalam ekonomi dan perlu mendapat perhatian serius. Namun, pemahaman demikian berbeda bila dilihat menurut ekonomi Kapitalisme, bahwa faktor distribusi bukanlah suatu faktor yang mengakibatkan timbulnya masalah ekonomi di masyarakat, melainkan faktor produksi, sebagaimana yang diungkapkan: “inti masalah ekonomi adalah masalah produksi. Para ekonom kapitalis berpendapat bahwa penyebab kemiskinan (ketidalcukupan) adalah kurangnya atau langkanya atau terbatasnya (*limited*) barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas (*un limited*) dan beraneka ragam. Untuk mengatasi persoalan tersebut, manusia perlu bekerja keras memproduksi sebanyak-banyaknya alat pemuas kebutuhannya itu. Untuk menghilangkan *gap* ini, harus dengan cara meningkatkan produksi sampai titik maksimum”¹⁹.

¹⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5, h. 32

¹⁸ Dessy Anwar, *Op. Cit*, h. 125.

¹⁹ Abdullah Abdul Husain at-Tariqi, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (terj) oleh M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), Cet. Ke-1, h. 286.

Selanjutnya, setelah dilakukan penelitian dan terkumpul berbagai jenis data yang diperlukan dalam penelitian, selanjutnya data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa data kualitatif, dimana dengan jalan mengklasifikasikan data-data yang akan dikumpulkan berdasarkan persamaan jenis. Kemudian data tersebut dianalisis dan diuraikan secara gamblang sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti. Adapun analisis data yang digunakan dan akhirnya diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian adalah analisis data yang senantiasa selalu berpedoman kepada prinsip dasar dalam ekonomi Islam, dan akhirnya diperoleh gambaran untuk dari permasalahan yang diteliti apakah sesuai atau bertentangan dengan konsep ekonomi Islam.

Dalam melakukan analisis yang senantiasa menjadikan prinsip-prinsip di dalam ekonomi Islam sebagai dasar (pedoman) dalam menganalisis tentang pendistribusian beras miskin (Raskin) di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, maka dapat dilihat dari dua permasalahan, yaitu:

1. Sistem pelaksanaan pendistribusian beras miskin (RASKIN) di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Berdasarkan uraian di atas, dimana terdapat beberapa poin penting tentang sistem pelaksanaan pendistribusian Raskin di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, yang bertentangan prinsip pendistribusian dalam ekonomi Islam, yaitu:

a. Pendistribusian tidak merata

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa tidak meratanya pendistribusian Raskin kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dimana Raskin yang seharusnya hak dari masyarakat kurang mampu, karena ketidaksanggupannya dalam mengganti beras dengan harga yang telah ditetapkan, sehingga hak mereka menjadi hilang dan berpindah kepada yang memiliki kesanggupan dalam membeli Raskin.

Dalam pandangan ekonomi Islam, terjadinya ketidakadilan dalam pendistribusian Raskin kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu, bila ditemukan ketidakadilan dalam pendistribusian Raskin, maka hal ini akan berdampak berpengaruh kepada kesejahteraan suatu masyarakat.

b. Besarnya bantuan

Besarnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat adalah maksimal 35 Kg dan minimal 8 Kg. Bila diperhatikan dari besarnya bantuan yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, maka bantuan tersebut belum maksimal dan membantu masyarakat kurang mampu sebagai persediaan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Karena, periode penyaluran bantuan Raskin kepada masyarakat bersifat relatif.

Dari data yang diperoleh maksimal pendistribusian Raskin kepada masyarakat maksimal kurun 5 bulan dan minimal 2 bulan. Dalam hal ini, bila bantuan yang diberikan sebesar 35 Kg dan periode pendistribusian berikutnya selama 2 bulan, maka hal ini akan bisa membantu dan mengurangi permasalahan ekonomi masyarakat kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Kondisi demikian berbeda dengan fakta yang ditemukan, dimana saat ini masyarakat menerima bantuan Raskin sebanyak 8 Kg untuk kurun waktu 5 bulan.

c. Pendistribusian Raskin tidak secara gratis

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa bantuan yang diberikan Raskin kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir berupa mengurangi harga jual pada kondisi normal. Dimana, saat kondisi normal harga beras bulog Rp. 5.000,- per kilogram. Sementara, pada saat pendistribusian harga jual beras bulog adalah Rp. 2.200,- per kilogram.

Di sisi lain, dari kondisi di lapangan diketahui bahwa bantuan Raskin tidak dapat dimiliki masyarakat ketika tidak memiliki kesanggupan dalam membayar beras sesuai berat yang diterima. Dalam perspektif ekonomi Islam, negara (penguasa) bagaikan pelindung dan perisai bagi warga negaranya. Berdasarkan kewajiban ini, negara (penguasa) berkewajiban melayani dan mengurus warga negaranya (*ni aayati li su-uli al-ummah*). Bila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penguasa belum menjalankan amanah dan fungsinya sebagai penguasa.

Dalam menjalankan amanah dan fungsinya sebagai penguasa yang senantiasa memberikan pelayanan dan mengurus umat, penguasa diberi otoritas dalam mengelola kepemilikan umum (*milku al-'aam*) seperti air, hutan dan sumber daya energi; dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat (publik) seperti memberikan kesehatan dan pendidikan secara gratis, memberikan bantuan (subsidi) kepada warga yang memiliki permasalahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seraya mereka difasilitasi untuk bekerja, dan lain sebagainya. Dan pembiayaan tersebut diambil dari *Baitul Maal* (kas negara), dari sumber pemasukan negara dari kepemilikan umum tersebut. Hal ini berdasarkan hadits Rasul SAW:

, , ()

Artinya: “Muslim berserikat dalam tiga hal; air, padang rerumputan (hutan), api (sumber daya energi)” (HR. Bukhari Muslim).

Berdasarkan kewajiban Negara (penguasa) dalam perspektif ekonomi Islam yang telah dijelaskan di atas, maka seharusnya bantuan Raskin diterima masyarakat kurang mampu secara gratis, dan tidak dengan cara memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh bantuan Raskin, tetapi harus membayar dengan ukuran beras yang mereka miliki.

2. Standar masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan beras miskin (RASKIN) di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.

Adapun dari sisi standar/ kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan Raskin adalah masyarakat yang memiliki taraf ekonomi tidak mampu (miskin). Dalam hal ini juga dapat diketahui bahwa dalam pendistribusian Raskin kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, dimana dari sisi konsep dan tujuan tidak bertentangan dengan konsep ekonomi di dalam Islam. Namun, dari sisi pelaksanaan pendistribusian (standar) bertentangan dengan konsep ekonomi Islam. Karena dalam Islam masyarakat yang memiliki taraf ekonomi tidak mampu, ketika mereka termasuk ke dalam kategori yang berhak menerima zakat (mustahik zakat).

Hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (TQS. at-Taubah [9]: 60)²⁰.

²⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 196.

Di sisi lain, dalam masalah kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan Raskin adalah mereka yang memiliki ekonomi kurang mampu, akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan masyarakat yang memiliki taraf ekonomi mampu mendapatkan bantuan Raskin tersebut. Setelah dilakukan analisis dari data-data yang dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis menurut pandangan ekonomi Islam, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa pendistribusian Raskin di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir bertentangan dengan konsep ekonomi Islam, karena terdapat ketidakadilan dan pemerataan dalam pendistribusian Raskin kepada masyarakat kurang mampu (miskin).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis dari data-data yang dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis menurut pandangan ekonomi Islam, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada masyarakat miskin di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, terlihat dari sisi pendistribusian tidak merata, besarnya bantuan yang diberikan dan pendistribusian yang tidak gratis.
2. Standar masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan Raskin di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, yaitu masyarakat kurang mampu yang dilihat dari besarnya penghasilan, jumlah tanggungan dan status dalam keluarga. Akan tetapi, dari segi pelaksanaannya ditemukan adanya masyarakat yang mampu mendapatkan bantuan tersebut.
3. Analisis menurut ekonomi Islam bahwa pendistribusian Raskin di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir bertentangan dengan konsep ekonomi Islam, karena terdapat ketidakadilan dan pemerataan dalam pendistribusian Raskin kepada masyarakat kurang mampu (miskin).

B. SARAN-SARAN

Melalui penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa saran-saran penelitian, kepada:

1. Masyarakat; diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan motivasi kepada masyarakat untuk bersikap aktif dalam melakukan kontrol dari setiap kebijakan penguasa yang menjalankan fungsinya sebagai pelayan dan mengurus urusan umat. Dimana, hendaknya bersikap kritis bila ditemukan adanya kebijakan tersebut yang bertentangan dengan konsep Islam, seperti dalam pendistribusian Raskin kepada masyarakat kurang mampu di Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah (petugas pendistribusian); diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk senantiasa selalu menjalankan amanah dan fungsinya sebagai pelayan dan mengurus urusan umat, di antaranya mendistribusikan bantuan Raskin sesuai kriteria dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dessy. *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001, Cet. Ke-1.
- al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fiqih Ekonomi Umar bin Khattab*, diterjemah oleh Asmuni Sholehan Zamakhsari, Jakarta: Khalifa (Pustaka al-Kautsar Group), 2003), Cet. Ke-1.
- al-Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam*, (terj) oleh Ibnu Sholah al-Izzah, Jakarta: Izzah, 2001.
- an-Nabhani, Taqiyuddin. *Nizhamu al-Islam*, (terj), Abu Amin, dkk, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, Bogor: Thariqul Izzah, 2001, Cet. Ke-5.
- _____. *Sistem Ekonomi Islam* (terj), Hafiz Abdurrahman, Edisi Mu'tamadah, Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2010, Cet. Ke-1.
- _____. *Syakhsiyah Islamiyyah*, ahli bahasa Zakia, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), Cet. Ke-3.
- as-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1417 H/ 1996 M, Cet. Ke-2.
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fanay ar-Riwayah wa ad-Dirayah min Ilmi at-Tafsir*, Tahqiq Abdurrahman Umairah, Mesir: Dar al-Wafa' al-Manshurah, 1418H/1997 M, Cet. Ke-2.
- at-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, (terj) oleh M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004, Cet. Ke-1.
- Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi* (terj), Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Gema Insani, 2006, Cet. Ke-2.
- Data Kelurahan Teluk Merbau Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 dan 15/DSN-MUI/IX/2000.
- Hizbuttahri, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)* (terj), Yahya AR, Jakarta: HTI Press, 2008, Cet. Ke-3.

<http://www.google.com-tatikmaryati-artikel/21/12/2010//>

<http://www.syabab.com//16-05-2011//> tentang jurnal ekononmi

<http://www.okezone.com//21-05-2011//>

Nasution, Muhammad. *Pengenalan Eksekutif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.

RI, Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Syamil Cipta Media, 2001, Cet. Ke-5.

Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009, Cet. Ke-8.

Rumini, S, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta: UPP IKIP Yogyakarta, 1995, Cet. Ke-4.

Said, Muh. *Pengantar Ekonomi Islam, (Dasar-Dasar Pengembangan)*, Pekanbaru: Suska Press, 2008, Cet. Ke-1.

Yusanto, M. Ismail, *Pengantar Ekonomi Islam*, Bogor: Al-Izzah, 2009. Cet. Ke-1.

Zallum, Abdul Qadim. *Sistem Keuangan Negara Khialafah* (terj), Ahmad S, dkk, Jakarta: HTI Press, 2009, Cet. Ke-1.